



# bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

# KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2024



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**



**KERANGKA ACUAN KERJA  
(KAK)**

**Tahun 2024**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan karunia-Nya sehingga dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu.

Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2024 disusun sebagai rencana dan dasar bagi pelaksanaan dalam menjalankan tugas dan merupakan dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda merupakan rencana untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Tahun 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	1
Daftar Isi .....	2
Bab 1. Pendahuluan .....	3
1. Latar Belakang .....	3
2. Dasar Hukum .....	3
3. Maksud dan Tujuan .....	4
4. Waktu dan Pelaksanaan .....	4
5. Rencana Penganggaran .....	5
Bab 2. Penutup .....	6



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2021-2026 tujuan yang harus dicapai adalah “*Terwujudnya Pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan*” dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penguatan dan Pemahaman Ideologi Pancasila sebagai Karakter Kebangsaan Bangsa, Politik, Sosial Budaya dan Keagamaan serta Penguatan Konflik Sosial.
2. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD

Dari sasaran ke 2 salah satu indikatornya adalah nilai evaluasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda, dimana pada tahun 2024 target yang harus dicapai adalah Sangat Baik (BB). Untuk mewujudkan pencapaian indikator tersebut, tentunya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah.

#### **2. Dasar Hukum :**

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438).
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;



3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah No 2 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 5 tahun 2013 tentang Standar Operasional Dan Prosedur Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
8. RPJMD Misi 3 : Mewujudkan pemerintahan yang professional, transparan, akuntabel dan bebas korupsi dengan memberi ruang bagi partisipasi masyarakat.  
Sasaran : meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD.

### **3. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan dari Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk menyediakan perencanaan dan penganggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam pencapaian visi dan misi Pememerintah Kota Samarinda.
2. Tujuan kegiatan ini agar tersusunnya dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) tahun 2024.

### **4. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Desember



## 5. Rencana Penganggaran

Rencana pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan dapat dilihat pada lampiran

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, berupa jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	Rp. 5.999.100,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



  
**MIFTAHURRIQZA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa jumlah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	Rp. 200.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekertaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Paket Bahan Logistik Kantor

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	Rp. 24.651.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Sekretaris Badan Kesbangpol

**MIFTAHURIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp. 42.999.740,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**

NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIZQA, SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	Rp. 12.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**MIFTAHURIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berupa Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	Rp. 195.381.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIQZA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum  
**SUB KEGIATAN** : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

### 2. Hasil

Tercapainya Nilai AKIP

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berupa Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

**E. JADWAL PELAKSANAAN**

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

**F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp. 100.000.000,-

**G. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd,M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIZQA,SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum  
**SUB KEGIATAN** : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya Nilai AKIP

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,

berupa Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Rp. 50.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum  
**SUB KEGIATAN** : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **2. Hasil**

Tercapainya Nilai AKIP

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, berupa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Rp. 50.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd,M.Si.**

NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIZQA,SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	Rp. 6.215.320.024,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekertaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, berupa Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	Rp. 1.022.285.242,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, berupa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Rp. 50.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekertaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

### 2. Hasil

Tersedianya laporan Jasa Surat Menyurat

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp. 20.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekertaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**

NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIQZA, SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

### 2. Hasil

Tersedianya laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	Rp. 30.900.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Sekretaris Badan Kesbangpol

**MIFTAHURRIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 laporan	Rp. 18.170.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

**MIFTAHURRIQZA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

## 2. Hasil

Terpelihara dan terbayarkannya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	Rp. 44.706.750,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Sekretaris Badan Kesbangpol



**MIFTAHURIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

### 2. Hasil

Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	Rp. 25.000.000,-

### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Sekretaris Badan Kesbangpol

MIFTAHURIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

### 2. Hasil

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, berupa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

#### JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### E. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Rp. 28.494.000,-

#### F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.  
NIP. 19670319 199702 1 003

MIFTAHURRIQZA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Kebangsaan

**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE

**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Orang yang telah mengikuti Koordinasi

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa jumlah Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : 12 kali Pelaksanaan Jumlah Peserta 1200 orang	Rp. 506.090.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Plt.Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

**MIFTAHURRIZQA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Kebangsaan
- NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE
- NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : 12 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 112.180.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd,M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Plt.Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

**MIFTAHURRIZQA,SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
**SUB KEGIATAN** : Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka  
**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Kebangsaan  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

## 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka berupa Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												4 dokumen

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	Rp. 1.800.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakan dan Purnapaskibraka Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.  
NIP. 19670319 199702 1 003

Plt.Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

MIFTAHURRIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**SUB KEGIATAN** : Pembentukan Paskibraka

**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE

**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Paskibraka

### 2. Hasil

Tercapainya jumlah Paskibraka

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka berupa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												4 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Peserta : 300 orang	Rp. 200.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Plt.Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

**MIFTAHURRIQZA, SE**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
**SUB KEGIATAN** : Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila  
**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

### 2. Hasil

Terpenuhi Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila berupa Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	40 orang	Rp. 100.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**

NIP. 19670319 199702 1 003

Plt.Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

**MIFTAHURRIZQA, SE**

Pembina (IV/a)

NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK  
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI  
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN  
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa jumlah Partai Politik Penerima Bantuan keuangan.

## **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>												<b>Total</b>
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nop</b>	<b>Des</b>	
				10 dok								10 dok

## **F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

dengan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Partai Politik Penerima Bantuan keuangan	10 dokumen	Rp. 50.913.097.550,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Kabid. Politik Dalam Negeri

**MUNAWAROH, S.Sos.MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa jumlah peserta Diskusi Politik dan Sosialisasi Politik.

## **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>											<b>Total</b>	
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nop</b>	<b>Des</b>	
												12 Laporan

## **F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta Diskusi Politik dan Sosialisasi Politik	Kegiatan : 17 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 10.000 orang	Rp. 1.517.874.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Kabid. Politik Dalam Negeri

**MUNAWAROH, S.Sos.MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Tim Monitoring Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D)	Kegiatan : 12 laporan Monitoring dan Evaluasi	Rp. 500.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Kabid. Politik Dalam Negeri

  
**MUNAWAROH, S.Sos.MM**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan Pemahaman tentang Undang Undang KeOrmasan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Ormas yang dibina

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Ormas.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi Pembinaan Ormas	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 600 orang	Rp. 220.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



SUCIPTO, S.Pd, M.Si.

NIP. 19670319 199702 1 003

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hj. Sri Repelita, S.Sos, M.Si.", written over a horizontal line.

Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Pemahaman tentang Undang Undang KeOrmasan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan : 25 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 125.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kabid. Ekosobud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### 2. Hasil

Menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Bebas Narkotika

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 600 orang	Rp. 263.500.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan



**Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### 2. Hasil

Terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama di Kota Samarinda

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan : 30 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.020.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan



**Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN  
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional
- NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196801301994031009

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Orang yang telah mengikuti Koordinasi

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi dan jumlah peserta sosialisasi, dan jumlah rapat Teknis, FKDM, PORA, WASDIN dan Rapat Penanganan Konflik.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rapat Teknis, FKDM, PORA, WASDIN dan Rapat Penanganan Konflik	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 1000 orang	Rp. 265.225.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

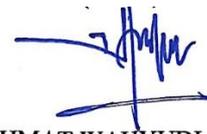
Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Kabid. Kewaspadaan Nasional



**ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si.**  
NIP. 196801301994031009

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional
- NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196801301994031009

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik	Kegiatan : 14 laporan Monitoring dan Evaluasi	Rp. 106.090.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala ~~Badan~~ Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



Kabid. Kewaspadaan Nasional



ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si.  
NIP. 196801301994031009

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  
**SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  
**UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional  
**NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si  
**NIP** : 196801301994031009

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan FORKOPIMDA

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, berupa jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Forkompinda.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran 2024 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen Hasil Pelaksanaan Forkompinda	12 dokumen	Rp. 297.540.448,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**  
NIP. 19670319 199702 1 003

Kabid. Kewaspadaan Nasional

**ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si.**  
NIP. 196801301994031009



## **BAB II**

### **PENUTUP**

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang termuat dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kota Samarinda yang bersumber dari APBD.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat agar menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Rencana Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam pengalokasian anggaran kegiatan dalam APBD Kota Samarinda Tahun 2024.

Samarinda, 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda



**SUCIPTO, S.Pd, M.Si.**

NIP. 19670319 199702 1 003



**BerAKHLAK** **bangga**  
melayani  
bangsa

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KERANGKA ACUAN KERJA TAHUN 2025



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Kebangsaan

**NAMA PPTK** : Plt. MIFTAHURRIZQA, SE

**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Orang yang telah mengikuti Koordinasi

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa jumlah Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : 12 kali Pelaksanaan Jumlah Peserta 800 orang	Rp. 300.000.000,-

## G. PENUTUP

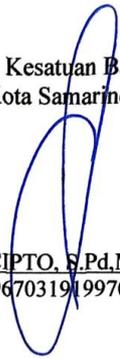
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Plt. Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA,SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Kebangsaan
- NAMA PPTK** : Plt. MIFTAHURRIZQA, SE
- NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan berupa jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan : 12 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 100.000.000,-

## G. PENUTUP

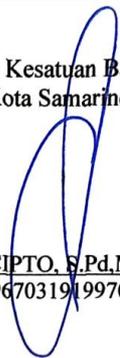
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Plt. Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  
**SUB KEGIATAN** : Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka  
**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa  
**NAMA PPTK** : Plt. MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

## 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	4 dokumen	Rp. 150.000.000,-

## G. PENUTUP

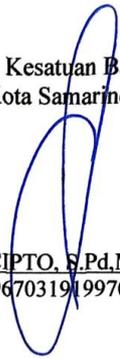
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Plt. Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA,SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**SUB KEGIATAN** : Pembentukan Paskibraka

**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

**NAMA PPTK** : Plt. MIFTAHURRIZQA, SE

**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Peserta yang mengikuti Seleksi Paskibraka

### **2. Hasil**

Tercapainya jumlah Paskibraka

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka berupa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Paskibraka.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kegiatan Pembentukan Paskibraka	Peserta : 300 orang	Rp. 1.500.000.000,-

#### G. PENUTUP

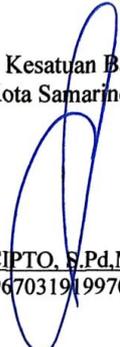
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan Paskibraka Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Plt. Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

**SUB KEGIATAN** : Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila

**UNIT KERJA** : Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa

**NAMA PPTK** : Plt. MIFTAHURRIZQA, SE

**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pemahaman Ideologi Bangsa dan Wawasan Kebangsaan

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

### **2. Hasil**

Terpenuhi Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	40 orang	Rp. 100.000.000,-

#### G. PENUTUP

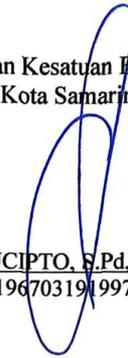
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Plt. Kabid. Ideologi, Wasbang  
Dan Karakter Bangsa

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK  
DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI  
PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN  
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,

Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah dokumen Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa jumlah Partai Politik Penerima Bantuan keuangan.

## **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>												<b>Total</b>
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nop</b>	<b>Des</b>	
					10 dok							10 dok

## **F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

dengan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Partai Politik Penerima Bantuan keuangan	10 dokumen	Rp. 2.250.000.000,-

## G. PENUTUP

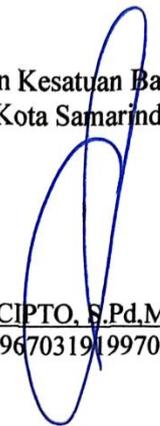
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025.

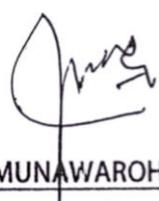
Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Politik Dalam Negeri

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MUNAWAROH, S.Sos.MM  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya jumlah peserta yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah berupa jumlah peserta Diskusi Politik dan Sosialisasi Politik.

## **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>											<b>Total</b>	
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nop</b>	<b>Des</b>	
												12 Laporan

## **F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika

Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta Diskusi Politik dan Sosialisasi Politik	Kegiatan : kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 2500 orang	Rp. 1.000.000.000,-

## G. PENUTUP

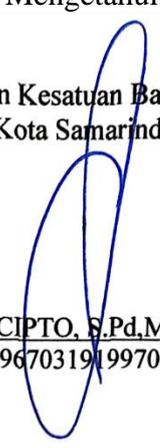
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Politik Dalam Negeri

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MUNAWAROH, S.Sos.MM  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Politik Dalam Negeri
- NAMA PPTK** : MUNAWAROH,S.Sos.MM
- NIP** : 196903251991032004

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan



## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Tim Monitoring Pemantauan Perkembangan Politik Daerah (TP3D)	Kegiatan : 12 laporan Monitoring dan Evaluasi	Rp. 500.000.000,-

## G. PENUTUP

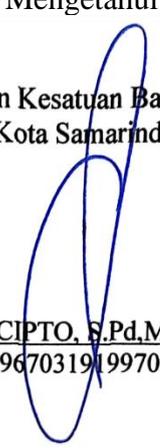
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Politik Dalam Negeri

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MUNAWAROH, S.Sos.MM  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690325 199103 2 004

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Pemahaman tentang Undang Undang KeOrmasan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### 2. Hasil

Menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Bebas Narkotika

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 600 orang	Rp. 150.000.000,-

## G. PENUTUP

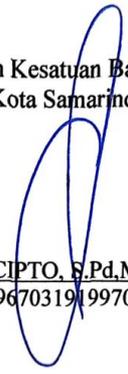
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO. S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Pemahaman tentang Undang Undang KeOrmasan

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Ormas yang dibina

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan : 50 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 150.000.000,-

## G. PENUTUP

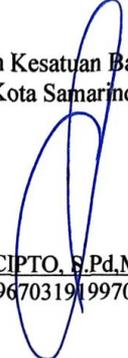
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### 2. Hasil

Menjadikan Kota Samarinda sebagai Kota Bebas Narkotika

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

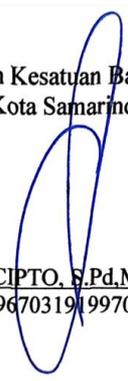
No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan ke Agamaan	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 600 orang	Rp. 150.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd,M.Si  
NIP. 196703191997021003

Samarinda, 1 Agustus 2024

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

  
Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Kemasyarakatan
- NAMA PPTK** : Hj. SRI REPELITA,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196901272001122001

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan Ketahanan Ekonomi

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

#### 2. Hasil

Terciptanya Kerukunan antar Umat Beragama di Kota Samarinda

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi	Kegiatan : 30 kali Monitoring dan Evaluasi	Rp. 1.030.000.000,-

## G. PENUTUP

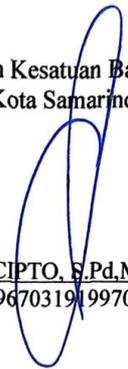
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Tahun Anggaran 2025.

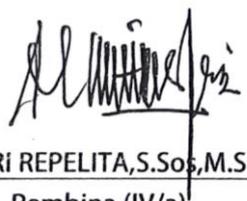
Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Ekososbud, Agama Dan  
Organisasi Kemasyarakatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
Hj. SRI REPELITA, S.Sos, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19690127 200112 2 001

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN  
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional
- NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196801301994031009

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah Orang yang telah mengikuti Koordinasi

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, berupa jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rapat Teknis, FKDM, PORA, WASDIN dan Rapat Penanganan Konflik.

## **E. JADWAL PELAKSANAAN**

<b>JADWAL PELAKSANAAN</b>											<b>Total</b>	
<b>Jan</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mei</b>	<b>Jun</b>	<b>Jul</b>	<b>Ags</b>	<b>Sep</b>	<b>Okt</b>	<b>Nop</b>	<b>Des</b>	
												12 Laporan

## **F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah rapat Teknis, FKDM, PORA, WASDIN dan Rapat Penanganan Konflik	Kegiatan : 12 kali pelaksanaan Jumlah Peserta : 1500 orang	Rp. 250.000.000,-

## G. PENUTUP

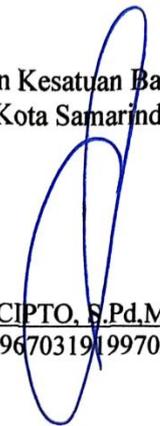
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Kabid. Kewaspadaan Nasional

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos.M.Si.  
NIP. 196801301994031009

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

- KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
- SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional
- NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si
- NIP** : 196801301994031009

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

### C. KELUARAN DAN HASIL

#### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

#### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, berupa jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik	Kegiatan : 14 laporan Monitoring dan Evaluasi	Rp. 100.000.000,-

## **G. PENUTUP**

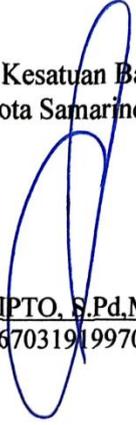
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Kewaspadaan Nasional

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
ROKHMAT WAHYUDI, S.Sos, M.Si.  
NIP. 196801301994031009

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  
**SUB KEGIATAN** : Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  
**UNIT KERJA** : Bidang Kewaspadaan Nasional  
**NAMA PPTK** : ROKHMAT WAHYUDI,S.Sos,M.Si  
**NIP** : 196801301994031009

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
- d. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatkan koordinasi pemantapan stabilitas Keamanan dan Ketertiban

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah dokumen hasil Koordinasi FORKOPIMDA

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, berupa jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 Laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Forkompinda	12 dokumen	Rp. 2.000.000.000,-

#### G. PENUTUP

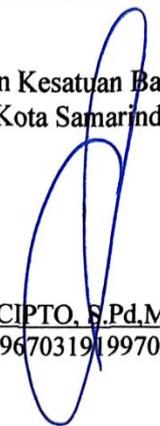
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

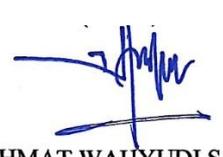
Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kabid. Kewaspadaan Nasional

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
ROKHMAT WAHYUDL, S.Sos.M.Si.  
NIP. 196801301994031009

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum  
**SUB KEGIATAN** : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah

### 2. Hasil

Tercapainya Nilai AKIP

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, berupa Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	Rp. 150.000.000,-

#### G. PENUTUP

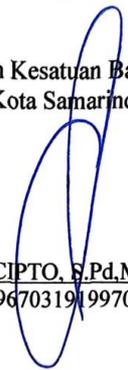
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum  
**SUB KEGIATAN** : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

### **2. Hasil**

Tercapainya Nilai AKIP

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, berupa Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	Rp. 50.000.000,-

### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **2. Hasil**

Tercapainya Nilai AKIP

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, berupa Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan dan Administrasi Umum dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	Rp. 50.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025.

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Samarinda, 1 Agustus 2024  
Sekertaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, berupa Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 orang	Rp. 6.991.340.247,-

#### G. PENUTUP

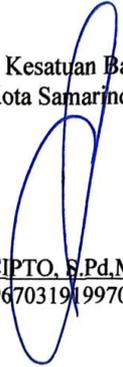
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, berupa Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 dokumen	Rp. 1.069.610.428,-

#### G. PENUTUP

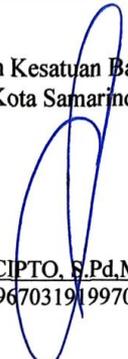
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	:	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Keuangan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, berupa Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	Rp. 50.000.000,-

#### G. PENUTUP

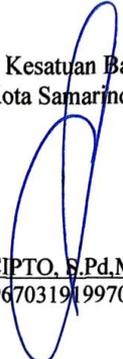
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIQZA, SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100 paket	Rp. 60.000.000,-

#### G. PENUTUP

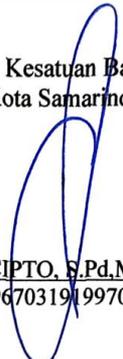
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, berupa Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	Rp. 100.000.000,-

#### G. PENUTUP

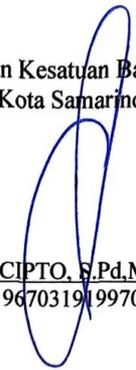
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, berupa jumlah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 paket	Rp. 10.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA,SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa jumlah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 paket	Rp. 100.000.000,-

## G. PENUTUP

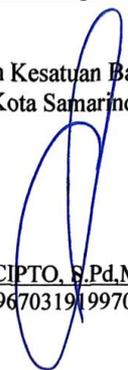
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA,SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Peralatan Rumah Tangga

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, berupa Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 paket	Rp. 10.000.000,-

### G. PENUTUP

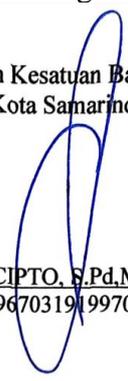
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Sekertaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Bahan Logistik Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Paket Bahan Logistik Kantor

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, berupa Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 paket	Rp. 17.500.000,-

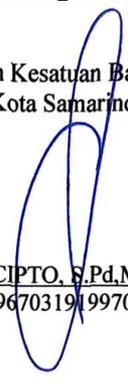
## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, berupa Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan.

**E. JADWAL PELAKSANAAN**

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

**F. RENCANA ANGGARAN**

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	Rp. 35.000.000,-

**G. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003



MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, berupa Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 dokumen	Rp. 3.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Fasilitasi Kunjungan Tamu
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

### 2. Hasil

Tercapainya Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, berupa Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	Rp. 12.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

MIFTAHURRIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

### **2. Hasil**

Tercapainya Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, berupa Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	Rp. 250.000.000,-

#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd,M.Si  
NIP. 196703191997021003



MIFTAHURRIQZA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan

### 2. Hasil

Tersedianya jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan, berupa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan	2 unit	Rp. 63.124.000,-

#### G. PENUTUP

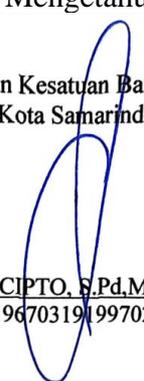
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	:	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	:	Pengadaan Mebel
<b>UNIT KERJA</b>	:	Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	:	MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	:	197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Paket Mebel yang disediakan

### 2. Hasil

Tersedianya jumlah Paket Mebel

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, berupa Jumlah Paket Mebel yang disediakan.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	12 unit	Rp. 10.000.000,-

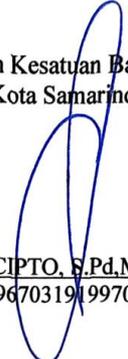
## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

### **2. Hasil**

Tersedianya laporan Jasa Surat Menyurat

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	Rp. 25.000.000,-

## G. PENUTUP

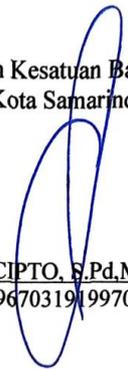
Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Sekretaris Badan Kesbangpol

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan

### **2. Hasil**

Tersedianya laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan.

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 laporan	Rp. 50.000.000,-

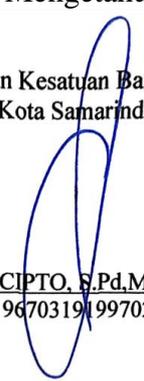
#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIQZA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan

#### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 laporan	Rp. 500.000.000,-

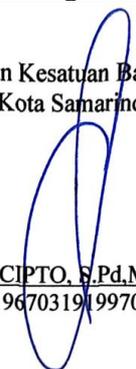
#### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIQZA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

**KEGIATAN** : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
**SUB KEGIATAN** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  
**UNIT KERJA** : Sekretariat  
**NAMA PPTK** : MIFTAHURRIZQA, SE  
**NIP** : 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

### **2. Hasil**

Tersedianya laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

## **D. RUANG LINGKUP**

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan

## E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

## F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 laporan	Rp. 25.000.000,-

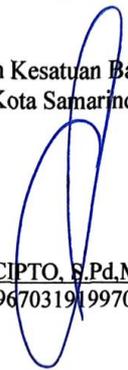
## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

  
MIFTAHURRIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

## **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2025**

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

## 2. Hasil

Terpelihara dan terbayarkannya Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan

### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan, berupa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	Rp. 70.000.000,-

## G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol



MIFTAHURRIZQA, SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

<b>KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## A. PENDAHULUAN

### 1. Dasar Hukum

- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### 2. Gambaran Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya tahun anggaran 2025.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## C. KELUARAN DAN HASIL

### 1. Keluaran

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara

### 2. Hasil

Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya

## D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, berupa Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara.

### E. JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN											Total	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop		Des
												12 laporan

### F. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	Rp. 10.000.000,-

### G. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

Sekretaris Badan Kesbangpol

MIFTAHURRIZQA,SE  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012

# **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

<b>KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
<b>SUB KEGIATAN</b>	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
<b>UNIT KERJA</b>	: Sekretariat
<b>NAMA PPTK</b>	: MIFTAHURRIZQA, SE
<b>NIP</b>	: 197207101998031012

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

### **2. Gambaran Umum**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya tahun anggaran 2025.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Meningkatnya pelayanan prima bagi ASN Interent

## **C. KELUARAN DAN HASIL**

### **1. Keluaran**

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

### **2. Hasil**

Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

#### D. RUANG LINGKUP

Metode yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, berupa Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

#### JADWAL PELAKSANAAN

JADWAL PELAKSANAAN												Total
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	
												12 laporan

#### E. RENCANA ANGGARAN

Rencana Anggaran Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp)/ Penyelenggaraan
1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Rp. 80.000.000,-

#### F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disusun untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025.

Samarinda, 1 Agustus 2024

Mengetahui,

Sekretaris Badan Kesbangpol

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Samarinda

  
SUCIPTO, S.Pd.M.Si  
NIP. 196703191997021003

  
MIFTAHURRIZQA, SE

Pembina (IV/a)  
NIP. 19720710 199803 1 012